

LAKIP 2022

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

*Dinas Kesehatan Kabupaten
Polewali Mandar*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah bentuk komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LAKIP ini adalah bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP Dinas Kesehatan. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Dokumen LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja ke depan.

Polewali, Maret 2023

Mengetahui,

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



H. M. SUAIB NAWAWI, SKM, M.Kes
NIP. 19630927 198311 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu perangkat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengemban tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar diwajibkan untuk menyusun perencanaan, pengukuran serta penilaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya agar mampu bekerja secara efektif, efisien dan produktif.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini yang utama adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tahun 2022 merupakan tahun dalam upaya pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024. Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui evaluasi indikator kinerja dapat menggambarkan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kabupaten Polewali Mandar dalam pembangunan mempunyai visi RPJMD “POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA”. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi, tujuan, dan sasaran, di bidang kesehatan misinya adalah “Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius” dengan tujuan “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”, serta sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan”.

Laporan kinerja ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan Laporan kinerja ini dimasa yang akan datang.

Polewali, Maret 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Polewali Mandar



H. M. SUAIB NAWAWI, SKM, M.Kes
NIP. 19630927 198311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	5
1.2 Aspek Strategis Organisasi	5
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Sumber Daya Manusia	25
1.6 Sarana dan Prasarana Kantor	25
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	26
A. Tujuan	26
B. Sasaran	27
C. Indikator Sasaran	27
D. Strategi	27
E. Kebijakan	28
F. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	29
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2022	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja	35
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	36
A. Target dan Realisasi Tahun Ini	36
B. Realisasi Tahun Ini dan Tahun Lalu	49
C. Capaian Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024	52
D. Permasalahan dan Solusi	56
3.3 Akuntabilitas Keuangan	60
A. Realisasi Keuangan	60
B. Alokasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Untuk Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar penyelenggara pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati Polewali Mandar. Penyampaian laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2019 - 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2022. Disamping itu penyusunan laporan kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar di masa yang akan datang.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan, disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkit penyakit.

Konsep penanganan kesehatan diarahkan secara promotif dan preventif. Disamping

upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan Rumah Sakit.

a. Upaya Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2022 sebesar 147 per 100.000 kelahiran hidup. Target SDGs Tahun 2030 yakni menurunkan hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Masih tingginya Angka Kematian Ibu kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya.

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2022 adalah 10 per 1.000 kelahiran hidup telah melampaui target SDGs 12 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas standar pelayanan kesehatan pada Bayi telah dapat dipenuhi secara bertahap.

Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada penyakit Tuberculosis, HIV/AIDS, Kusta, Pneumonia Balita, Hepatitis B, dan Diare. Kecenderungan Penyakit Tidak Menular (PTM) atau Non-Communicable Disease cenderung meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dikenal juga sebagai penyakit degeneratif tidak lagi menyerang usia lanjut tetapi juga mulai terjadi pada kelompok umur produktif. Penyakit Tidak Menular (PTM) utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan juga cenderung menunjukkan keberhasilan. Tetapi masih perlu terus diupayakan keberlanjutan program dan kegiatannya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat terutama kualitas kesehatan lingkungan yang setinggi-tingginya.

Gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza merupakan masalah kesehatan yang juga menjadi fokus pembangunan kesehatan. Keduanya berkaitan dengan masalah perilaku yang dapat membahayakan diri. Prioritas untuk kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza adalah masyarakat, untuk mencegah meningkatnya gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza.

b. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari pelayanan dasar meliputi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes; dan pelayanan rujukan Rumah Sakit, secara rasio dan wilayah Kabupaten Polewali Mandar belum memenuhi standar ideal.

Yang menjadi permasalahan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan adalah prasarana yang mendukung seperti kondisi jalan dan transportasi yang belum memadai. Dari sisi kualitas pelayanan juga masih belum optimal, disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada.

c. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase rumah tangga ber-PHBS, capaian Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 adalah 100% RT ber-PHBS. Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2022 sebesar 100% dari 167 desa siaga yang ada.

Perilaku merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan. Maka promosi kesehatan merupakan intervensi strategis dalam memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, terkait dengan upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

d. Sumber Daya Kesehatan

Upaya pembangunan kesehatan belum optimal dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya sehubungan dengan masih adanya sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan kelengkapan alat medis yang masih kurang. Akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal, serta budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat juga masih menjadi hal yang menghambat dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal. Kemampuan aparatur dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan.

Hal lain yang menjadi kendala keterbatasan adalah pembiayaan kesehatan, belum efektif dan efisien. Masyarakat miskin masih banyak yang belum memiliki jaminan kesehatan, baik yang dijamin oleh pemerintah pusat maupun daerah. Serta belum didukung dengan Sistem Informasi Komunikasi yang terintegrasi.

Dukungan serta komitmen Pemerintah Daerah dan legislatif yang memungkinkan regulasi pembangunan kesehatan lebih terarah dan baik, sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan dan farmasi, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.
2. Pelaksanaan kebijakan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dan farmasi, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
6. Pembinaan Unit Pelayanan Teknis.

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar penyelenggara pelayanan kesehatan. Rincian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan diuraikan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri atas:

- a. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
- b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas :

- Kepala Dinas

- Sekretariat
- Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- Bidang Sumber Daya Kesehatan
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahi :

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- Seksi Surveilans dan Imunisasi;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Sumber Daya Kesehatan membawahi:

- Seksi Kefarmasian;
- Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berpedoman pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas-tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
3. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
4. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
5. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
6. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
7. penyelenggaraan administrasi keuangan;
8. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
9. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
10. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas membawahi :

- o Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan pelaporan satuan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - d. pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
 - h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- o Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi satuan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
- c. pengendalian administrasi keuangan;
- d. pengendalian perbendaharaan;

- e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
- f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
- g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

o Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
- d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
- e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. pengendalian administrasi barang;
- g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
- i. pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. **Bidang Bina Kesehatan Masyarakat**

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan masyarakat;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kesehatan masyarakat;
3. penyelenggaraan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
4. penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
5. penyelenggaraan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
6. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan kesehatan masyarakat;
7. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kesehatan masyarakat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

o **Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
3. pengendalian pembinaan kesehatan ibu-anak;
4. pengendalian pembinaan kesehatan usia lanjut;
5. pengendalian pembinaan kelangsungan hidup dan kesehatan maternal, neonatal dan balita;
6. pengendalian pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di dalam dan diluar sekolah;
7. pengendalian pembinaan kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan lanjut usia;
8. pengendalian pembinaan dan fasilitasi standar pelayanan kebidanan (asuhan persalinan normal) dan standar pelayanan kontrasepsi;
9. pengendalian pembinaan penanganan komplikasi maternal dan neonatal;
10. pengendalian pembinaan pencegahan kehamilan yang tak diinginkan dan asuhan pasca keguguran;
11. pengendalian pembinaan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergency Dasar) dan rumah sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif);

12. pengendalian pembinaan dan fasilitasi penerapan buku KIA, penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), pelatihan/penyegaran kembali Stimulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SIDDTK);
13. pengendalian pembinaan, fasilitasi dan pelayanan kesehatan deteksi dini kanker mulut rahim dan kanker payudara, kemudian pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA);
14. pengendalian penyusunan kebutuhan bahan pangan, peralatan dan sarana obat gizi serta operasional kegiatan program gizi;
15. pengendalian pembinaan kewaspadaan dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan mikro;
16. pengendalian pembinaan pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus;
17. pengendalian pembinaan dan fasilitasi peningkatan gizi masyarakat pada kelompok sasaran (balita, remaja, usia subur, bumil, busui dan usia lanjut) yang terintegrasikan dengan program Kesehatan Keluarga;
18. pembinaan dan fasilitasi pelayanan gizi di posyandu dalam rangka meningkatkan ketrampilan kader bekerjasama dengan lintas program dan sektor terkait;
19. pengendalian pembinaan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS);
20. pengendalian pembinaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi);
21. pembinaan dan fasilitasi pemantauan Status Gizi (PSG) masyarakat, pencegahan dan penanggulangan gizi buruk, pencegahan dan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi, pencegahan dan penanggulangan kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
22. pengendalian pembinaan dan fasilitasi pelayanan gizi institusi;
23. pengendalian pemetaan daerah rawan gizi dan keluarga sadar gizi;
24. pengendalian pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS);
25. pengendalian penguatan kinerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Tim Pangan dan Gizi (TPG), Pokja Penanggulangan Gizi Buruk dan Pokja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI);

26. pengendalian koordinasi teknis pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
27. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi; dan
28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

○ **Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
3. pengendalian pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan;
4. pengendalian pelaksanaan advokasi dan kemitraan lintas sektor, klinik, dan rumah sakit;
5. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas UKBM;
6. pengendalian penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi Kesehatan, serta sarana dan prasarana UKBM;
7. pengendalian pelaksanaan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik;
8. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi desa siaga, posyandu, taman posyandu, poskesdes, poskestren, polindes, Saka Bakti Husada (SBH), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pembinaan kader kesehatan dan kelompok potensial lainnya;
9. pengendalian koordinasi teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

○ **Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga**

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
3. pengendalian pelatihan bagi petugas kesehatan lingkungan (kesling), kader kesling dan petugas kesehatan kerja dan olah raga;
4. pengendalian pembinaan kesehatan lingkungan dan permukiman, kebersihan kegiatan usaha pariwisata, pasar, terminal, Rumah Sakit dan sarana umum lainnya;
5. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyehatan air dan sanitasi dasar;
6. pengendalian pembinaan surveilans dan pengawasan pemeriksaan kualitas air termasuk pada pengambilan dan pengiriman sampel air ke laboratorium;
7. pengendalian pembinaan, pengawasan, pengambilan, dan pemeriksaan sampel makanan dan minuman serta bahan pangan;
8. pengendalian pembinaan, pengawasan dan perlindungan hygiene dan sanitasi pangan;
9. pengendalian pembinaan penyehatan udara, tanah dan kawasan;
10. pengendalian pembinaan pengamanan limbah dan radiasi;
11. pengendalian pembinaan sanitasi darurat daerah bencana dan rest area pada situasi mudik hari raya;
12. pengendalian pembinaan kesehatan okupasi, pekerja dan lingkungan kerja;
13. pengendalian pelaksanaan pembinaan sanitasi industri makanan dan minuman, depot air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, hotel, restoran dan rumah makan serta yang berhubungan dengan tempat-tempat umum dan sarana penyediaan air bersih;
14. pengendalian pembinaan penyehatan perumahan, penyehatan sampah dan/atau limbah rumah tangga (limbah domestik), sarana air bersih dan survei jentik;
15. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap penjual dan pengguna pestisida dan pengelolaan TPS dan TPA, serta pemantauan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan melalui klinik sanitasi;
16. pengendalian pembinaan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) pada kelompok formal dan non formal;
17. pengendalian pembinaan kesehatan kerja dan keselamatan kerja;

18. pengendalian pembinaan penyelenggaraan kesehatan kerja dasar;
19. pengendalian pembinaan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat;
20. pengendalian pelaksanaan tes kebugaran pada jamaah haji;
21. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
22. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pencegahan dan pengendalian penyakit;
- penyelenggaraan surveilans dan imunisasi;
- penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- penyelenggaraan koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

o **Seksi Surveilans dan Imunisasi**

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan surveilans dan imunisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan surveilans dan imunisasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan surveilans dan imunisasi;
3. pengendalian pelaksanaan imunisasi terhadap bayi, balita, anak sekolah, dan

Wanita Usia Subur (WUS) untuk memberikan perlindungan terhadap Penularan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);

4. pengendalian pengamatan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM);
5. pengendalian penyiapan kecukupan persediaan vaksin dan bahan bundling untuk Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan swasta yang melakukan imunisasi;
6. pengendalian pembinaan tentang pencegahan penyakit, pengamatan penyakit menular dan tidak menular serta terhadap Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
7. pengendalian pengamatan epidemiologi terhadap penyakit menular terpilih dan penyakit tidak menular terpilih untuk mengetahui sebab-sebabnya serta kemungkinan mengarah pada kejadian luar biasa atau wabah penyakit serta tanda- tanda adanya kejadian luar biasa atau wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal di semua matra baik darat, laut maupun udara;
8. fasilitasi pemeriksaan kesehatan dan imunisasi terhadap calon jamaah haji serta pengamatan terhadap jamaah haji sepulang dari tanah suci;
9. pengendalian koordinasi teknis surveilans dan imunisasi;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

o **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
3. pengendalian penyakit menular langsung (IMS, HIV/AIDS, TBC, Kusta, ISPA, Diare, Frambusia, dll);
4. pengendalian penyakit bersumber binatang (demam berdarah, chikungunya, malaria, filariasis, leptospirosis, dll);
5. pengendalian penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;

6. pengendalian penyiapan kebutuhan sarana dan operasional kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
7. pengendalian koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

o **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
4. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan kesehatan jiwa,
5. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penggunaan NAPZA;
6. pengendalian kebutuhan sarana dan operasional kegiatan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA;
7. pengendalian koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. **Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan

fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
3. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
4. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
5. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan tradisional;
6. penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
7. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

o **Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
3. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer Puskesmas dan Rumah Sakit;
4. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan unggulan spesialistik;
5. pengendalian peningkatan mutu penanggulangan masalah kesehatan dan kegawatdaruratan;
6. pengendalian peningkatan mutu pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

o **Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan**

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas mengendalikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
3. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
4. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang diagnostik;
5. pengendalian fasilitasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
6. pengendalian koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

o **Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas mengendalikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
3. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
4. pengendalian koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan

manajemen sumber daya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis manajemen sumber daya kesehatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional manajemen sumber daya kesehatan;
3. penyelenggaraan manajemen sumber daya kefarmasian;
4. penyelenggaraan pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
5. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia kesehatan;
6. penyelenggaraan koordinasi teknis manajemen sumber daya kesehatan;
7. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen sumber daya kesehatan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

o **Seksi Kefarmasian**

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan manajemen pelayanan Kefarmasian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
3. pengendalian pengelolaan perbekalan kefarmasiandan kesehatan pangan, dan kosmetika yang beredar;
4. pengendalian obat-obatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
5. pengendalian pelayanan obat generik di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah;
6. pengendalian pembinaan penggunaan, penyimpanan dan pemusnahan obat dengan cara yang benar;
7. pengendalian pengelolaan gudang instalasi farmasi kabupaten;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen Kefarmasian; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

- **Seksi Alat Kesehatan dan PKRT**

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan alat kesehatan dan PKRT.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Alat Kesehatan dan PKRT menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
3. pengendalian penyusunan analisis kebutuhan alat kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah;
4. pengendalian penyediaan, penggunaan dan pemanfaatan alat kesehatan pada Puskesmas;
5. pengendalian pemeliharaan alat kesehatan pada Puskesmas;
6. pengendalian penghapusan dan pemusnahan alat kesehatan pada Puskesmas;
7. pengendalian pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan;
8. pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan alat kesehatan dan PKRT; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas mengendalikan manajemen sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis manajemen sumber daya manusia kesehatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional manajemen sumber daya manusia kesehatan;
3. pengendalian analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Kabupaten;
4. pengendalian pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, studi banding, magang dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
5. pengendalian pembinaan disiplin dan kinerja sumber daya manusia

- kesehatan;
6. pengendalian pelaksanaan kode etik profesi sumber daya manusia kesehatan;
 7. pengendalian penyelenggaraan registrasi dan akreditasi tenaga medis dan tenaga paramedis;
 8. pengendalian fasilitasi rekomendasi perizinan sarana praktik tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana sarana lain yang berhubungan dengan tehnik kesehatan;
 9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen sumber daya manusia kesehatan; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. UPT Dinas Kesehatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan terdiri atas Instalasi Farmasi Kabupaten dan Puskesmas yang masing-masing memiliki fungsi teknis diantaranya; Instalasi Farmasi Kabupaten memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pengadaan obat dan BMHP serta menjamin ketersediaan stock obat dan BMHP yang akan didistribusikan kepada masing-masing puskesmas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan kesehatan dengan pemberian obat secara rasional kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas

pelayanan kesehatan.

Selain itu Puskesmas juga sebagai unit pelaksana teknis yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui berbagai jenis upaya pelayanan kesehatan seperti upaya pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan.

1.5 Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 971 orang. Dari 971 pegawai tersebut, 827 diantaranya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), 42 orang tenaga administrasi, dan 102 orang tenaga kontrak daerah.

1.6 Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah sarana pelayanan kesehatan tahun 2022 antara lain : puskesmas sebanyak 20 unit, puskesmas pembantu sebanyak 65 unit, jumlah posyandu sebanyak 657 unit dan tersebar di 167 desa/kelurahan dan posbindu berjumlah 134 unit. Jumlah gudang farmasi sebanyak 1 unit, jumlah laboratorium kesehatan daerah sebanyak 1 unit, jumlah UTD dan PMI sebanyak 2 unit.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

A. Tujuan

Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar diartikan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan hasil review dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar perlu segera melakukan revisi dokumen Renstra karena beberapa alasan, antara lain : (1) Adanya perubahan kebijakan nasional seiring dengan terbitnya RPJM Nasional, dimana RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 di-Perda-kan sebelum terbitnya RPJM Nasional; (2) Adanya perubahan metode pengukuran beberapa indikator kinerja utama, seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan IPM yang berdampak terhadap penetapan target kinerja; (3) Adanya penambahan atau perubahan indikator kinerja akibat terjadinya perubahan konsep, seperti angka Harapan Lama Sekolah, PNB perkapita, dan sebagainya; (4) Adanya sejumlah indikator kinerja pembangunan nasional yang seyogyanya diakomodir di dalam dokumen RPJMD.

Tahun 2016 terdapat perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, sehingga dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut melalui perubahan struktur kelembagaan di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang mengharuskan perubahan atau revisi dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian visi dan implementasi misi, maka dirumuskan sejumlah tujuan serta sasaran dan Indikator Sasaran Renstra. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, bersifat idealis dan mempunyai jangkauan kedepan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta didasarkan pada isu-isu stratejik.

Mengacu pada pernyataan visi dan rumusan misi pemerintah daerah yang telah

disusun, yaitu:

Visi : Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera

Misi : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah meningkatnya derajat kesehatan.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan, yaitu : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat.

C. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah ukuran keberhasilan dari sasaran untuk mencapai tujuan. Adapun indikator dari sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Angka Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Angka kesakitan penyakit menular TB
4. Angka kesakitan penyakit menular HIV/AIDS
5. Angka kesakitan penyakit menular kusta
6. Angka kesakitan penyakit menular Pneumonia Balita
7. Angka kesakitan penyakit menular Hepatitis B
8. Angka kesakitan penyakit menular Diare
9. Angka kesakitan penyakit tidak menular Hipertensi
10. Angka kesakitan penyakit tidak menular Diabetes Melitus
11. Angka kesakitan penyakit tidak menular orang dengan gangguan jiwa berat
12. Prevalensi penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi
13. Prevalensi Stunting
14. Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan

D. Strategi

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai sasaran strategis utama yaitu peningkatan status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan kelangsungan hidup, dengan sasaran :

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 62,53 tahun menjadi 62,86 tahun.
2. Menurunnya angka kematian bayi dari menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup.
3. Menurunkan angka kematian ibu dari 185 per 100.000 menjadi 147 per 100.000 kelahiran hidup.

4. Menurunnya prevalensi gizi kurang
5. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi 100%.
6. Menurunkan angka kesakitan secara signifikan pada semua kasus penyakit dan efektifnya pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit menular.

E. Kebijakan

Kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar akan diarahkan pada permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan strategi status kelangsungan hidup, status kesehatan dan status pelayanan kesehatan yang ditemukan. Penyelesaian masalah berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang ditemuati dalam renstra Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan hak-hak asasi manusia akan kesehatan dengan prioritas individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang beresiko serta bersperspektif gender. Kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan ini termuat dalam bentuk program dan kegiatan rutin, prioritas dan penunjang. Kebijakan program dan kegiatan utama adalah Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup, melalui penurunan AKI, AKB dan Penurunan Status Gizi Buruk dan Kurang serta daya tahan anak balita terhadap berbagai macam penyakit. Dan dijabarkan dalam 6 Kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekankan pada peningkatan akses dan jaminan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terus menerus, secara kualitas dan kuantitas dapat mencapai standar pelayanan prima.
2. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah.
3. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah.
4. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam usaha kesehatan bersumber masyarakat melalui kegiatan konsolidasi, pengembangan dan kemandirian antara petugas dan kelompok masyarakat.
5. Peningkatan kualitas SDM-Kesehatan melalui bimbingan teknis secara berkala dan bekerja berdasarkan standar operasional prosedur
6. Peningkatan mutu manajemen administrasi kesehatan melalui peningkatan sumber daya aparatur, perencanaan program dan pengelolaan keuangan serta pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

F. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
		Pengembangan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (Covid-19)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		

		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PSC-118
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan, Restoran, dan Depot Air Mimum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Fasilitas Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	

	Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
--	----------	---

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan Rencana Strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumber daya lainnya. Tujuan dilakukan Penetapan Kinerja ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum diterapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel. Sedangkan Tujuan Khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama jajaran Satuan Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	180 per 100.000 Kelahiran Hidup	201 per 100.000 Kelahiran Hidup	147 per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi	10 per 1.000 Kelahiran Hidup	11 per 1.000 Kelahiran Hidup	10 per 1.000 Kelahiran Hidup
		Angka kesakitan penyakit menular TB	158 per 100.000 Penduduk	204 per 100.000 Penduduk	209 per 100.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular HIV/AIDS	1.88 per 1.000 Penduduk	1 per 1.000 Penduduk	7 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Kusta	1.39 per 10.000 Penduduk	1 per 10.000 Penduduk	1,4 per 10.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Pneumonia Balita	4.6 per 1.000 Balita	4 per 1.000 Balita	10 per 1.000 Balita
		Angka kesakitan penyakit menular Hepatitis B	6.47 per 1.000 Ibu Hamil	2 per 1.000 Ibu Hamil	0,2 per 1.000 Ibu Hamil
		Angka kesakitan penyakit menular Diare	13 per 1.000 Penduduk	25 per 1.000 Penduduk	18 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Hipertensi	180 per 1.000 Penduduk	71 per 1.000 Penduduk	36 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Diabetes Melitus	12 per 1.000 Penduduk	15 per 1.000 Penduduk	9 per 1.000 Penduduk

		Angka kesakitan penyakit tidak menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1.4 per 1.000 Penduduk	0.2 per 1.000 Penduduk	2 per 1.000 Penduduk
		Prevalensi penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	431 per 1.000 Lansia	293 per 1.000 Lansia	330 per 1.000 Lansia
		Prevalensi Stunting	23.8%	18.6%	22,5%
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	95%	95%	92,5%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	B
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	92%	95.56%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	62,53 Tahun	62,63 Tahun	62,86 Tahun
2	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	180 per 100.000 Kelahiran Hidup	201 per 100.000 Kelahiran Hidup	147 per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB)	10 per 1.000 Kelahiran Hidup	11 per 1.000 Kelahiran Hidup	10 per 1.000 Kelahiran Hidup
		Angka kesakitan penyakit menular TB	158 per 100.000 Penduduk	204 per 100.000 Penduduk	209 per 100.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular HIV/AIDS	1.88 per 1.000 Penduduk	1 per 1.000 Penduduk	7 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Kusta	1.39 per 10.000 Penduduk	1 per 10.000 Penduduk	1,4 per 10.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Pneumonia Balita	4.6 per 1.000 Balita	4 per 1.000 Balita	10 per 1.000 Balita
		Angka kesakitan penyakit menular Hepatitis B	6.47 per 1.000 Ibu Hamil	2 per 1.000 Ibu Hamil	0,2 per 1.000 Ibu Hamil
		Angka kesakitan penyakit menular Diare	13 per 1.000 Penduduk	25 per 1.000 Penduduk	18 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Hipertensi	180 per 1.000 Penduduk	71 per 1.000 Penduduk	36 per 1.000 Penduduk

	Angka kesakitan penyakit tidak menular Diabetes Melitus	12 per 1.000 Penduduk	15 per 1.000 Penduduk	9 per 1.000 Penduduk
	Angka kesakitan penyakit tidak menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1.4 per 1.000 Penduduk	0.2 per 1.000 Penduduk	2 per 1.000 Penduduk
	Prevalensi penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	431 per 1.000 Lansia	293 per 1.000 Lansia	330 per 1.000 Lansia
	Prevalensi Stunting	23.8%	18.6%	22,5%
	Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	95%	95%	92,5%

Pada table 3.1 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 62,86 Tahun dan masih banyak belum mencapai target yang diharapkan terutama pada indikator angka kesakitan penyakit menular TB, HIV/AIDS, Kusta, Pneumonia Balita, serta angka kesakitan penyakit tidak menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi, dan Prevalensi Stunting yang menjadi masalah dan secara nasional masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Kondisi tersebut menggambarkan secara umum keadaan status kesehatan masyarakat di suatu wilayah menjadi penilaian bahwa pembangunan kesehatan di masih perlu ditingkatkan baik dari segi upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara kuantitas dan kualitas serta pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas kesehatan primer maupun sekunder, selain itu peran aktif kerjasama lintas sektor secara kelembagaan untuk serta bersama-sama berkomitmen melakukan upaya pembangunan kesehatan secara terintegrasi dari segi implementasi program perlu digalakkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

A. Target dan Realisasi Tahun Ini

Target dan Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100%	58,171,761,887	100%	57,705,879,709
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun	Persen	100%	117,456,300	100%	117,047,920
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	66,818,600	1	66,719,720
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	36,583,700	1	36,278,200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2	14,054,000	1	14,050,000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	Persen	100%	57,558,511,637	100%	57,111,156,601
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Jumlah	827 ASN	53,860,840,037	827 ASN	53,523,835,001
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi	Jumlah	42 Tenaga	3,664,642,000	42 Tenaga	3,554,292,000
	Jumlah tenaga kontrak daerah		102 Tenaga		102 Tenaga	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1	27,779,600	1	27,779,600
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Realisasi Anggaran yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1	5,250,000	1	5,250,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	4,408,400	100%	3,748,400
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	4,408,400	1	3,748,400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	10,492,800	100%	10,492,800
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dilakukan monev, evaluasi dan penilaian kerja sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	100 Pegawai	10,492,800	321 Pegawai	10,492,800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	214,649,200	90%	211,618,805
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Jenis	9	3,609,200	9	3,609,200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	1	13,855,000	1	12,575,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	4	14,980,000	4	14,671,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Jenis	4	14,980,000	4	1,440,000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang dilayani	Bulan	12	12,144,000	12	12,110,100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang tersedia makan minum	Kegiatan	4	167,641,000	4	167,213,505
	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	LPD	47		47	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	143,137,650	100%	140,867,058
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	BULAN	12	143,137,650	12	140,867,058
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	123,105,900	75%	110,948,125
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	8	78,077,300	7	66,895,914
	Jumlah unit kendaraan dinas yang dilengkapi surat izin	Unit	7		6	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Peralatan	10	33,000,000	7	32,191,611
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	Bangunan	1	12,028,600	1	11,860,600
	Jumlah jenis peralatan kerja yang terpelihara	Unit Gedung	1		1	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persen	100%	115,564,169,580	100%	103,531,761,460
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	Persen	100%	25,396,003,900	100%	23,303,167,313
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Gedung	1	275.000.000	2	165.724.065

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Puskesmas	20	6.190.950.000	20	4.873.778.879
	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Paket	1		1	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Puskesmas	20	9.500.970.900	20	9.285.862.191
	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Paket	1		1	
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yang disediakan	Jenis	365	4.106.787.963	0	3.837.096.928
	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	Puskesmas	20		20	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai	Jenis BMHP	80	5.322.295.037	64	5.140.705.250
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten	Persen	100%	90.073.292.880	100%	80.134.681.347
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	9264 Orang	209.140.100	7123 Orang	198.582.300
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	8843 Orang	259.580.000	7970 Orang	258.950.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	4785 Orang	45.000.000	8046 Orang	30.061.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	4785 Orang	21.611.400	39978 Orang	16.958.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	69357 Orang	30.000.000	12101 Orang	22.292.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta KB aktif	Jumlah	62589 Peserta KB Aktif	95.800.200	157364 Peserta KB Aktif	94.976.700
	Jumlah Posbindu yang terbentuk	Unit	167 Posbindu		134 Posbindu	
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kelompok Pra Konsepsi	Unit	20 Puskesmas		20 Puskesmas	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	Jumlah	34141 Orang	55.000.000	19579 Orang	53.170.000
	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	Unit	6 Unit		8 Unit	
	Jumlah Penduduk Lansia yang dilakukan pembinaan kemandirian	Jumlah	38522 Orang		19393 Orang	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penduduk dengan hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	24966 Orang	49.998.300	17506 Orang	49.543.300
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penduduk dengan diabetes melitus yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	6662 Orang	50.000.700	4270 Orang	47.826.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan standar	Jumlah	957 Orang	50.000.000	822 Orang	42.795.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	8618 Orang	50.000.000	8618 Orang	45.169.700
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	11739 Orang	50.000.000	8264 Orang	45.306.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Kurus	Jumlah	47853 Orang	708.504.600	615 Orang	666.682.400
	Jumlah keluarga yang menerapkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)	Jumlah	52394 KK		57143 KK	
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe)	Jumlah	9264 Orang		581 Orang	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan	Unit	20	15.000.200	43	14.960.200

	Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	Unit	20		20	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan STBM	Desa	167 Desa	162.500.100	20	150.843.800
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini yang direpson	Jumlah	143 Kali	29.909.400	167 Kali	26.594.400
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah unit pelayanan Kesehatan khusus (UTD dan PMI)	Jumlah	2 unit	1.330.286.200	2 unit	1.330.286.200
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	100%	179.984.800	100%	163.089.800
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) Kapitasi	Jumlah	385124 Peserta	64.981.586.500	467479 Peserta	58.368.548.789
	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS (PBI)	Jumlah	414054 Orang		372188 Orang	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan kunjungan di RS Wonomulyo	Jumlah	108.000	4.888.414.200	2481	4.873.000.834
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah jenis dokumen laporan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (PKP, RUK, RPK)	Jumlah	12 Dokumen	15.650.566.680	12 Dokumen	13.354.236.044
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Target Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah	300.000.000 Rupiah	100.000.000	235.349.000 Rupiah	99.470.380
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	Jumlah	20 Unit	827.769.000	20 Unit	0
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah	167 Desa/Kel.	49.359.700	85 Desa/Kel.	46.971.300
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani di bawah 24 jam	Jumlah	1 desa	137.805.400	1 desa	88.895.400
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase gawat darurat yang ditangani	Persen	100%	45.475.400	100%	45.470.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe C dan D yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Persen	100%	94.872.800	100%	93.912.800
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	Unit	20 Puskesmas	94.872.800	20 Puskesmas	93.912.800
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan)	Persen	100%	406,876,000	100%	321,908,500
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga produk makanan dan minuman yang memiliki izin	Persen	100%	406,876,000	100%	321,908,500
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Unit	32	406.876.000	32	321,908,500
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	62%	177.504.800	100%	163.155.800
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader kesehatan	Persen	100%	100.004.800	100%	97.504.800
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	Jumlah	56 Orang	100.004.800	56 Orang	97.504.800

Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS	Persen	100%	77,500,000	100%	65,651,000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	Jumlah	167 Desa/ Kel.	77,500,000	167 Desa /Kel.	65,651,000
	Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah	52112 KK		57.143 KK	
	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan PHBS	Jumlah	401 SD		362 SD	



Sumber : Program KIA Dinkes Kab. Polman, 2022

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.

Kematian ibu menurut WHO adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Grafik di atas menggambarkan trend angka kematian ibu mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir, yakni dalam rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, namun terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu yang sangat besar, hingga mencapai AKI 300 per 100.000 kelahiran hidup, atau dengan kata lain setiap 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 300 kematian maternal (ibu). Tahun 2019 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan yang signifikan hingga 198 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan yaitu 140 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini diasumsikan dari setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 140 kematian ibu, atau dalam konstanta 10.000, maka setiap 10.000 kelahiran hidup terdapat 14 kematian ibu di Kabupaten Polewali Mandar. Tahun 2021 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan yaitu 180 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini diasumsikan dari setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 180 kematian ibu, atau dalam konstanta 10.000, maka setiap 10.000 kelahiran hidup terdapat 18 kematian ibu di Kabupaten Polewali Mandar. Tahun 2022 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan yang hingga 147 per 100.000 kelahiran hidup.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sudah diserukan secara global. SDGs disebut lebih komprehensif dan lebih menantang daripada Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) karena muatan isu-isunya yang juga jauh lebih kompleks. Dalam kaitannya dengan penurunan Angka Kematian Ibu, SDGs menargetkan AKI pada tahun 2030 dapat diturunkan hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar terjadi penurunan kematian ibu pada tahun 2022, dalam proses perjalanannya, beberapa indikator penunjang Angka Kematian Ibu ini belum maksimal dan masih memiliki hambatan, antara lain:

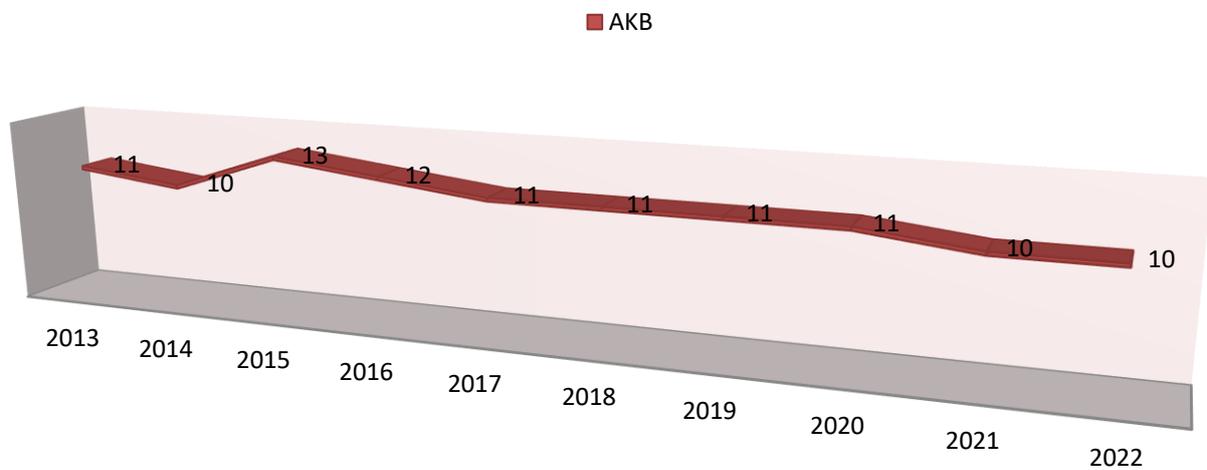
Hambatan:

1. Tidak semua puskesmas memiliki rumah tunggu.
2. Jumlah ibu dengan kelahiran lebih dari 3 malu memeriksakan kehamilan, sehingga capaian K4 tidak mencapai target.
3. Beberapa daerah masih memiliki jarak tempuh yang jauh untuk sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Angka Drop Out KB yang masih tinggi.

Solusi:

1. Menganggarkan operasional sewa rumah tunggu di setiap puskesmas
2. Melakukan advokasi kepada pemerintah desa, agar Alokasi Dana Desa sebagian digunakan untuk mengadakan kendaraan atau sewa kendaraan ibu hamil yang akan ke fasilitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan peran lintas sector dan lintas program, dalam upaya pengenalan kesehatan reproduksi remaja, dan KB.

SITUASI ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013-2022



Sumber : Program KIA Dinkes Kab. Polman, 2022

Angka Kematian Bayi

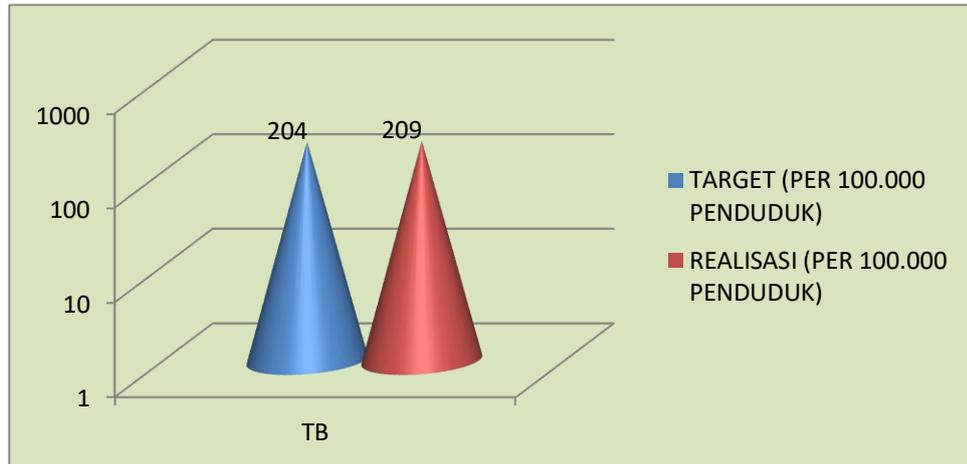
Menurut WHO (World Health Organization) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 0-11 bulan per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu dalam kandungan dan luar kandungan. Kematian bayi dalam kandungan adalah kematian bayi yang dibawa oleh bayi sejak lahir seperti asfiksia. Sedangkan kematian bayi luar kandungan atau kematian post neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh dari luar.

Hingga tahun 2030 dalam Sustainable Development Goals menargetkan penurunan Angka Kematian Bayi hingga 12 per 1000 kelahiran hidup.

Berdasarkan target perjanjian kinerja tahun 2022, Angka kematian bayi dapat diturunkan sesuai target yang ingin dicapai, dengan kata lain indikator ini berkinerja baik. Target yang dicapai sebesar 10 per 1000 kelahiran hidup, yang mengasumsikan dari setiap 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar, terdapat 10 bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Target yang telah dicapai ini juga telah sejalan dengan target SDGs dimana SDGs menargetkan 12 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

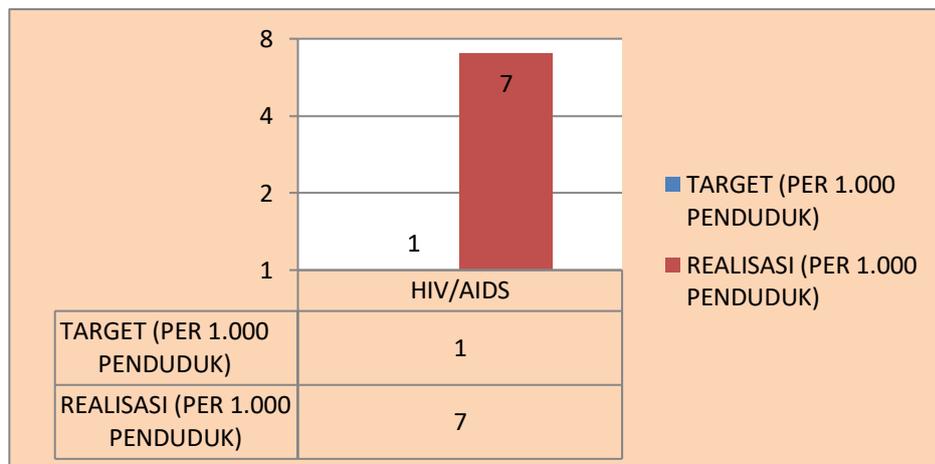
**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN
UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH**

Prevalensi Tuberculosis



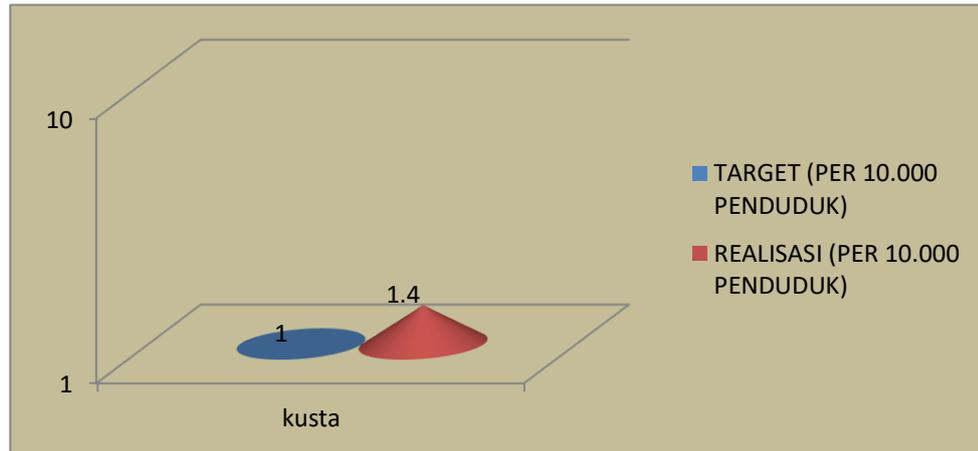
**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM
DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Prevalensi HIV/AIDS



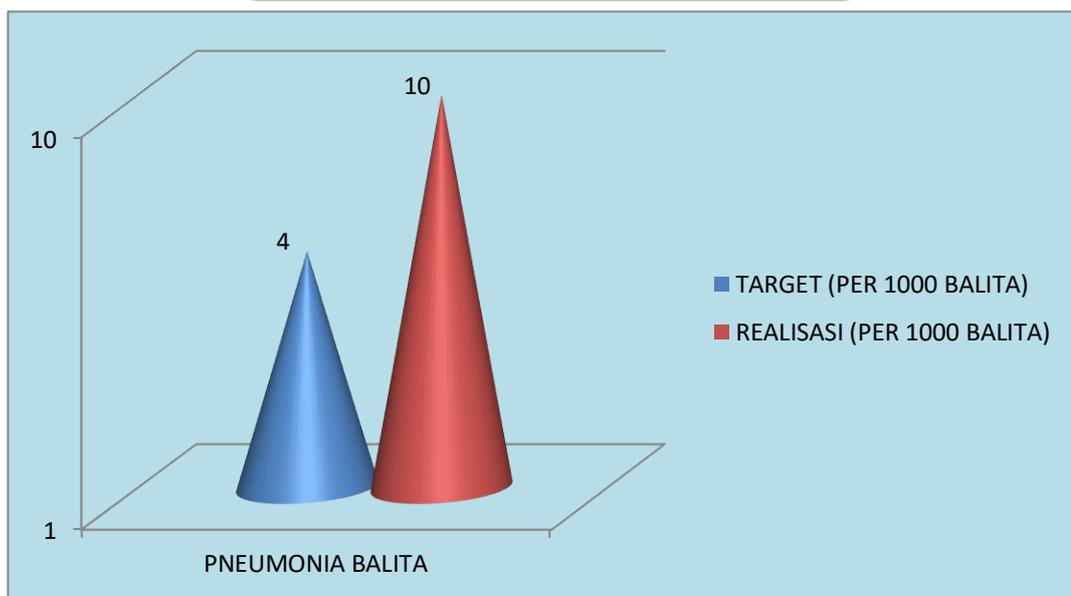
PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prevalensi Kusta



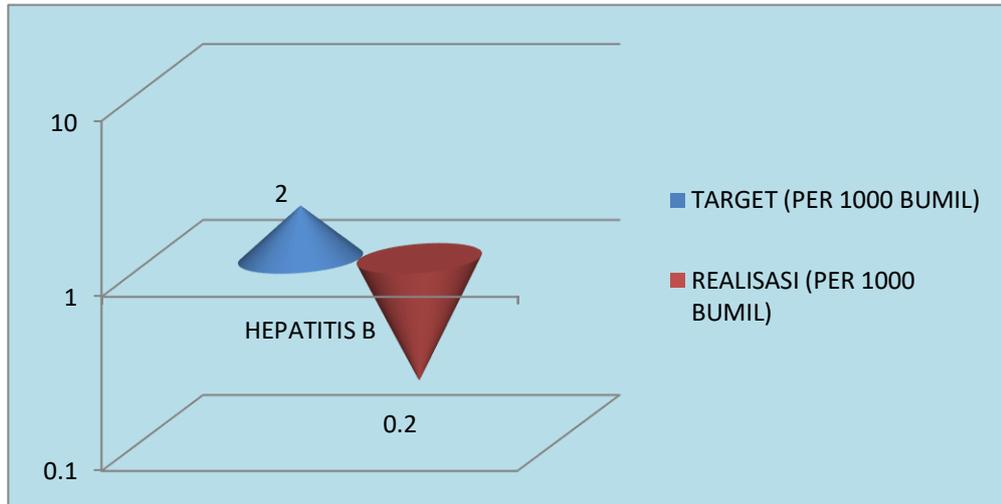
PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Insidensi Rate Pneumonia Balita



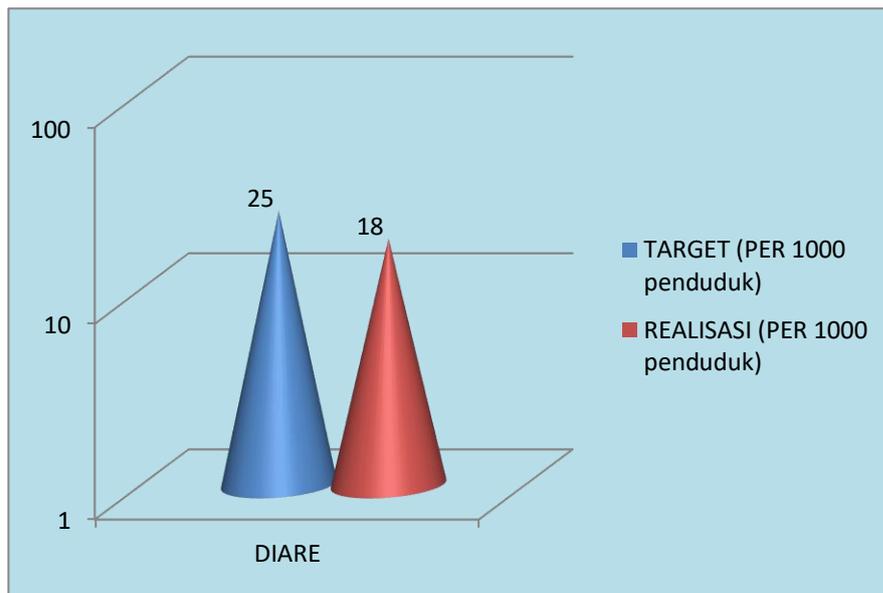
PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Insidensi Rate Hepatitis pada Ibu Hamil



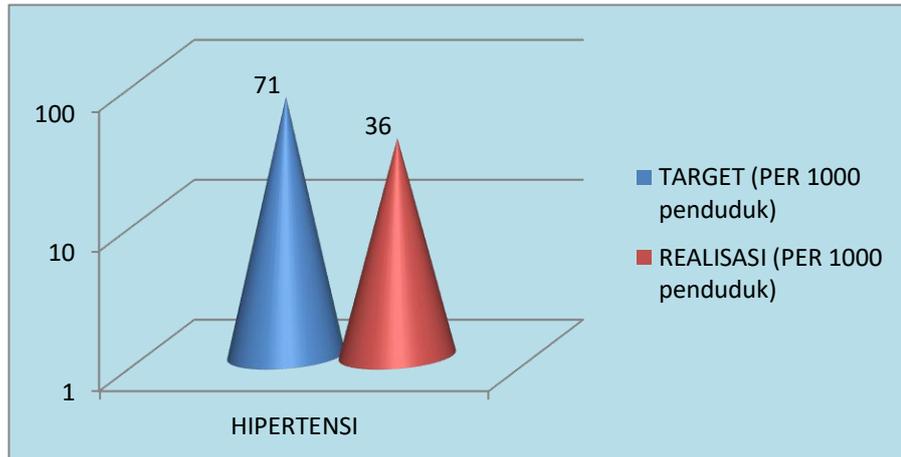
PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Insidensi Rate Diare



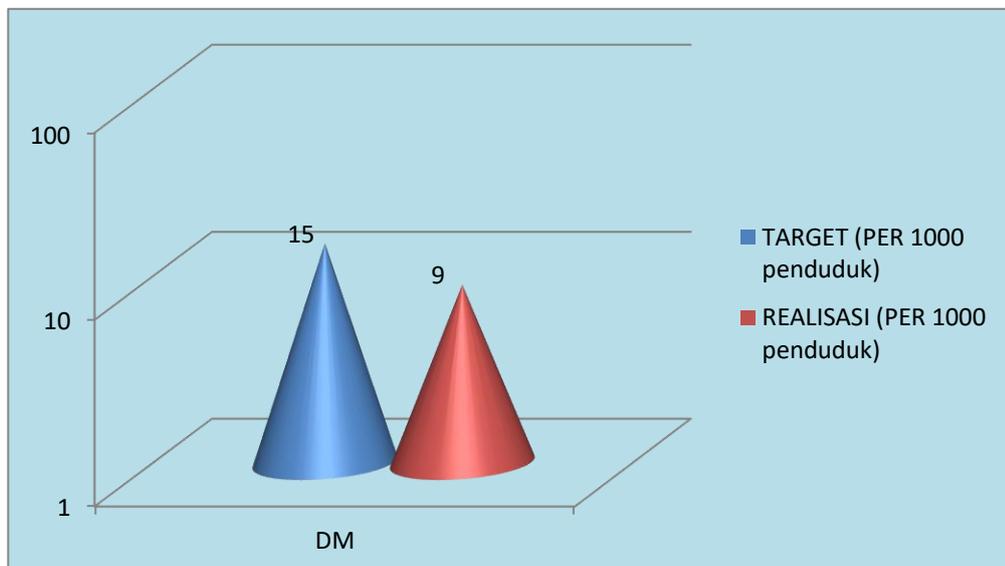
**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM
DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Prevalensi Hipertensi



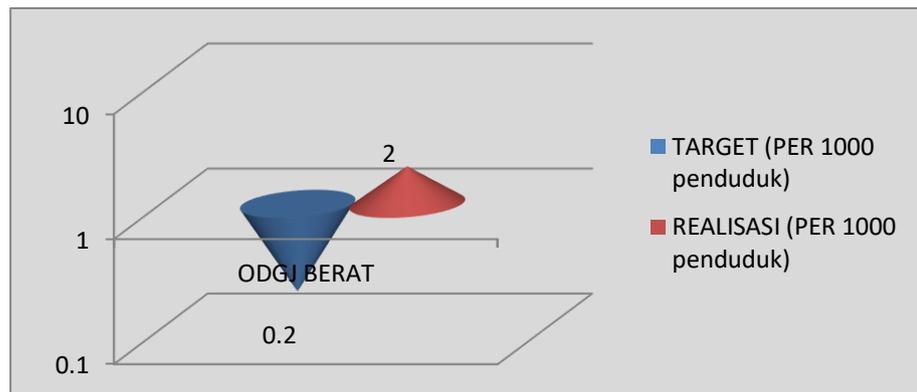
**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK
UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Prevalensi Diabetes Mellitus



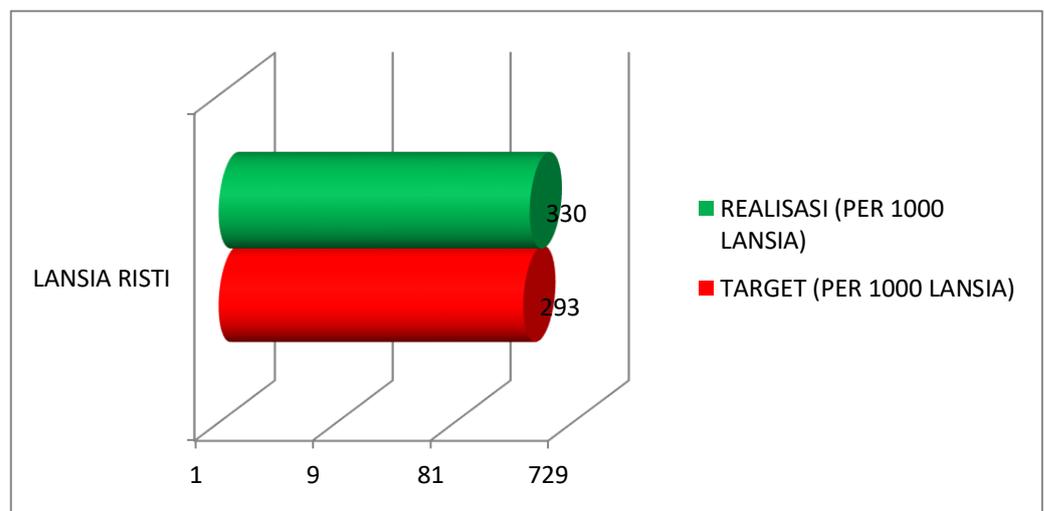
**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK
UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Prevalensi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat



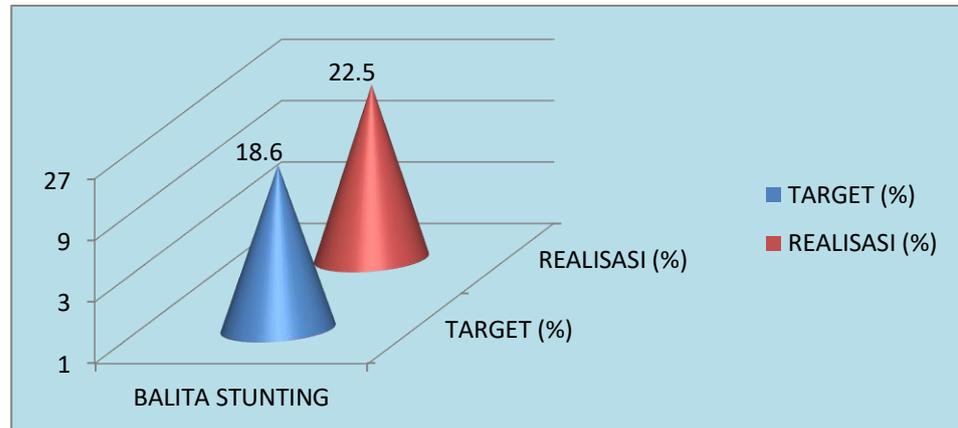
**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi



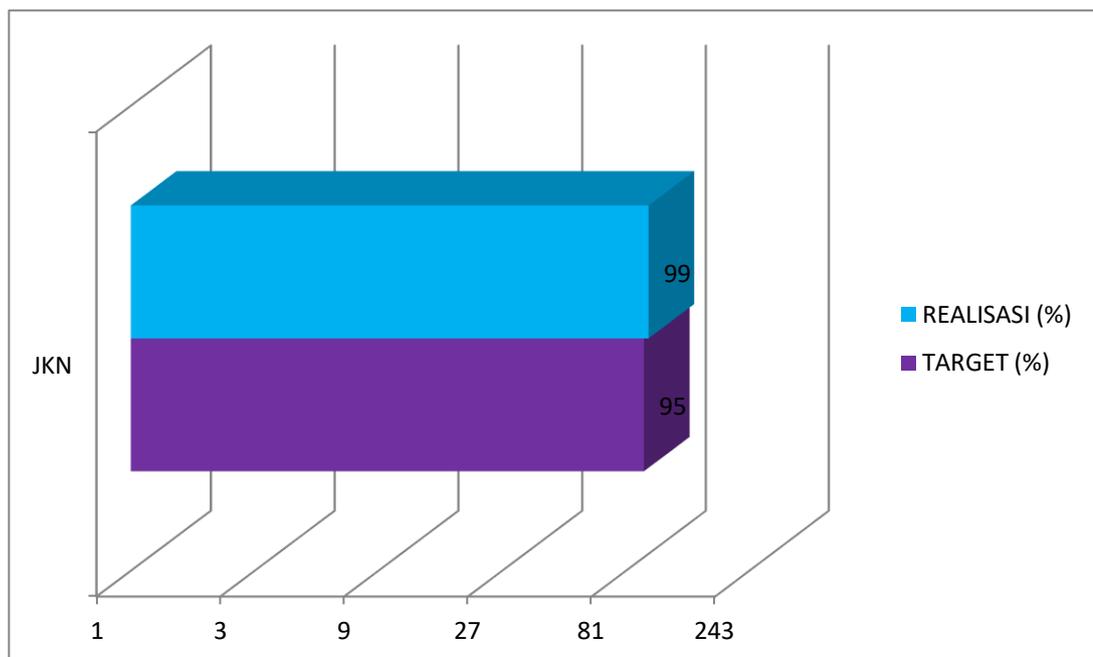
**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM
DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Prevalensi Balita Stunting



**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Persentase Masyarakat yang Memperoleh Jaminan Kesehatan



B. Realisasi Tahun Ini dan Tahun Lalu

Realisasi Kinerja Sub Kegiatan OPD Kesehatan

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram/Kegiatan	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun	Persen	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	Persen		100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Jumlah	818 ASN	827 ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi	Jumlah		42 Tenaga
	Jumlah tenaga kontrak daerah		104 Tenaga	102 Tenaga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1	1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Realisasi Anggaran yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen		1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen		100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen		1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen		100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dilakukan monev, evaluasi dan penilaian kerja sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah		321 Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen		90%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Jenis		9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Paket		1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis		4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Jenis		4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang dilayani	Bulan		12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang tersedia makan minum	Kegiatan		4
	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	LPD		47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	Bulan	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen		75%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Uint	4	7
	Jumlah unit kendaraan dinas yang dilengkapi surat izin	Unit		6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Peralatan		7
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	Bangunan	1	1
	Jumlah jenis peralatan kerja yang terpelihara	Unit Gedung	1	1
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persen		100%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	Persen		100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Gedung	2	2
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Puskesmas	20	20
	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Paket	5	1
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Puskesmas	20	20
	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Paket	230	1
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yang disediakan	Jenis	346	0
	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	Puskesmas	20	20
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai	Jenis BMHP		64
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten	Persen		100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	82,3%	7123 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	93,1%	7970 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	99%	8046 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	63,6%	39978 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	88%	12101 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta KB aktif	Jumlah	29%	157364 Peserta KB Aktif
	Jumlah Posbindu yang terbentuk	Unit		134 Posbindu
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kelompok Pra Konsepsi	Unit		20 Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	Jumlah	42,9%	19579 Orang
	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	Unit		8 Unit
	Jumlah Penduduk Lansia yang dilakukan pembinaan kemandirian	Jumlah		19393 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penduduk dengan hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	93%	17506 Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penduduk dengan diabetes melitus yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	85%	4270 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan standar	Jumlah	69%	822 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	47,46%	8618 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	66%	8264 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Kurus	Jumlah	100%	615 Orang
	Jumlah keluarga yang menerapkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)	Jumlah		57143 KK
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe)	Jumlah		581 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan	Unit	20	43
	Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	Unit		20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan STBM	Desa	55	20
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon	Jumlah	100%	167 Kali
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah unit pelayanan Kesehatan khusus (UTD dan PMI)	Jumlah	2 unit	2 unit
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	100%	100%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) Kapitasi	Jumlah	94,86%	467479 Peserta
	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS (PBI)	Jumlah		372188 Orang
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan kunjungan di RS Wonomulyo	Jumlah	100%	2481
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah jenis dokumen laporan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (PKP, RUK, RPK)	Jumlah	100%	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Target Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah	60	235.349.000 Rupiah
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	Jumlah	100%	20 Unit
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah	38,32%	85 Desa/Kel.
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani di bawah 24 jam	Jumlah	100%	1 desa
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase gawat darurat yang ditangani	Persen		100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe C dan D yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Persen	100%	100%
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	Unit	20 Puskesmas	20 Puskesmas
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan)	Persen		100%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga produk makanan dan minuman yang memiliki izin	Persen		100%

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Unit	51	32
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen		100%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader kesehatan	Persen		100%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	Jumlah		56 Orang
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS	Persen		100%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	Jumlah	163 Desa /Kel.	167 Desa/Kel.
	Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah		57.143 KK
	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan PHBS	Jumlah		362 SD

C. Capaian Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Target
			2022	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun	Persen	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	Persen	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Jumlah	827 ASN	827 ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi	Jumlah	42 Tenaga	42 Tenaga
	Jumlah tenaga kontrak daerah		102 Tenaga	102 Tenaga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1	1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Realisasi Anggaran yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1	1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1

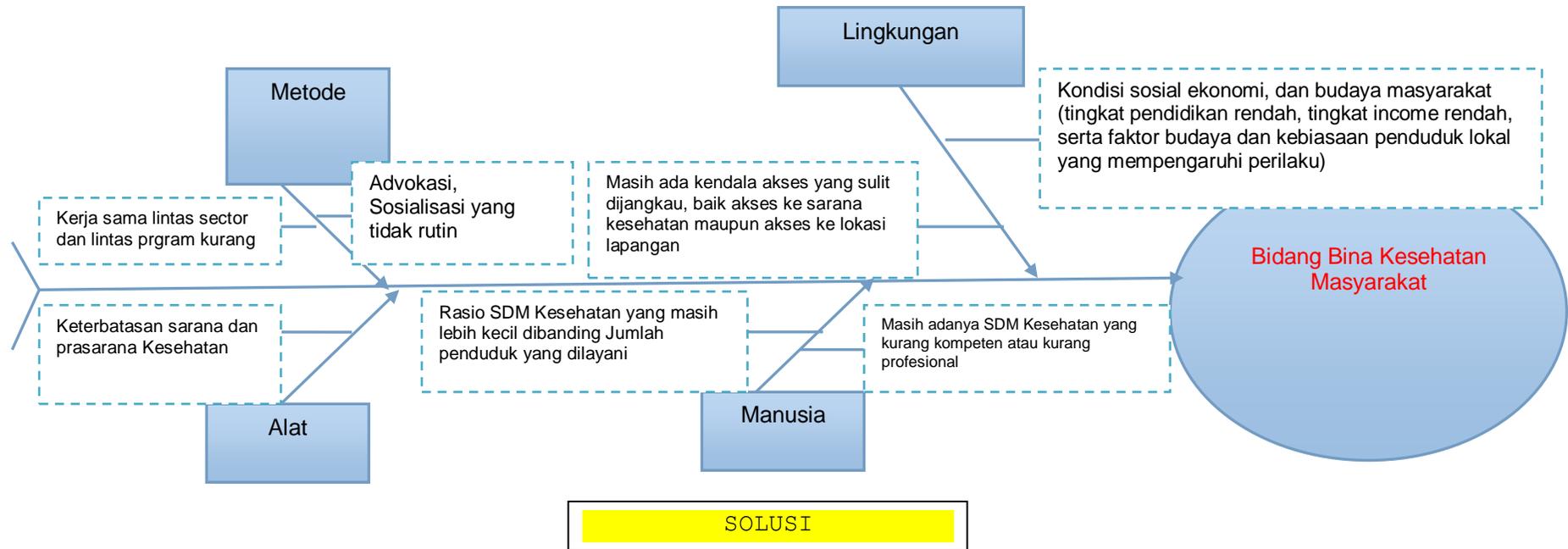
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dilakukan movev, evaluasi dan penilaian kerja sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	321 Pegawai	100 Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	90%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Jenis	9	9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	1	1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	4	4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Jenis	4	1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang dilayani	Bulan	12	6 kali
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang tersedia makan minum	Kegiatan	4	
	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	LPD	47	47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	Bulan	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	75%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	7	8
	Jumlah unit kendaraan dinas yang dilengkapi surat izin	Unit	6	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Peralatan	7	10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	Bangunan	1	
	Jumlah jenis peralatan kerja yang terpelihara	Unit Gedung	1	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persen	100%	100%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	Persen	100%	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Gedung	2	2
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Puskesmas	20	20
	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Paket	1	1
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Puskesmas	20	20
	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Paket	1	1
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yang disediakan	Jenis	0	365
	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	Puskesmas	20	20
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai	Jenis BMHP	64	80
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten	Persen	100%	100%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	7123 Orang	13340 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	7970 Orang	12734 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	8046 Orang	12128 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	39978 Orang	6890 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	12101 Orang	99874 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta KB aktif	Jumlah	157364 Peserta KB Aktif	90128 Peserta KB Aktif
	Jumlah Posbindu yang terbentuk	Unit	134 Posbindu	167 Posbindu
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kelompok Pra Konsepsi	Unit	20 Puskesmas	20 Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	Jumlah	19579 Orang	55472 Orang
	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	Unit	8 Unit	9 Unit
	Jumlah Penduduk Lansia yang dilakukan pembinaan kemandirian	Jumlah	19393 Orang	55472 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penduduk dengan hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	17506 Orang	25720 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penduduk dengan diabetes melitus yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	4270 Orang	9692 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan standar	Jumlah	822 Orang	194 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	8618 Orang	11891 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	8264 Orang	17410 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Kurus	Jumlah	615 Orang	68908 Orang
	Jumlah keluarga yang menerapkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)	Jumlah	57143 KK	75447 Orang
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe)	Jumlah	581 Orang	13340 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan	Unit	43	20
	Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	Unit	20	20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan STBM	Desa	20	20
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon	Jumlah	167 Kali	206 kali
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah unit pelayanan Kesehatan khusus (UTD dan PMI)	Jumlah	2 unit	2 unit
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	100%	100%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) Kapitasi	Jumlah	467479 Peserta	554579 Peserta
	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS (PBI)	Jumlah	372188 Orang	596238 Orang
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan kunjungan di RS Wonomulyo	Jumlah	2481	155520

Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah jenis dokumen laporan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (PKP, RUK, RPK)	Jumlah	12 Dokumen	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Target Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah	235.349.000 Rupiah	350.000.000 Rupiah
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	Jumlah	20 Unit	20 Unit
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah	85 Desa/Kel.	167 Desa/Kel.
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani di bawah 24 jam	Jumlah	1 desa	167 Desa/Kel.
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase gawat darurat yang ditangani	Persen	100%	100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe C dan D yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Persen	100%	100%
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	Unit	20 Puskesmas	20 Puskesmas
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan)	Persen	100%	100%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga produk makanan dan minuman yang memiliki izin	Persen	100%	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Unit	32	32
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	100%	100%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader kesehatan	Persen	100%	100%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	Jumlah	56 Orang	
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS	Persen	100%	100%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	Jumlah	167 Desa/Kel.	167 Desa/Kel.
	Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah	57.143 KK	75.046 KK
	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan PHBS	Jumlah	362 SD	401 SD

D. Permasalahan dan Solusi

ANALISIS MASALAH SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN PARTISIPATIF



1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter internship.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
4. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.
5. Melakukan aksi dan advokasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat.

ANALISIS MASALAH SASARAN OPTIMALNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERBASIS POLA PERKEMBANGAN PENYAKIT



SOLUSI

1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter internship.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
4. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.
5. Melakukan aksi dan advokasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat.

ANALISIS MASALAH MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Metode

Lingkungan



SOLUSI

1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter internship.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.

ANALISIS MASALAH MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KEFARMASIAN, SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Metode

Lingkungan



Bidang Sumber Daya
Kesehatan

SOLUSI

1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter internship.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

A. Realisasi Keuangan

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Rp
			Rp	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	58,171,761,887	57,705,879,709	99
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun	Persen	117,456,300	117,047,920	99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	66,818,600	66,719,720	99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	36,583,700	36,278,200	99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14,054,000	14,050,000	99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	Persen	57,558,511,637	57,111,156,601	99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah	53,860,840,037	53,523,835,001	99
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi	Jumlah	3,664,642,000	3,554,292,000	96
	Jumlah tenaga kontrak daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	27,779,600	27,779,600	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Realisasi Anggaran yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	5,250,000	5,250,000	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	4,408,400	3,748,400	85
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	4,408,400	3,748,400	85
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	10,492,800	10,492,800	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dilakukan monev, evaluasi dan penilaian kerja sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	10,492,800	10,492,800	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	214,649,200	211,618,805	98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Jenis	3,609,200	3,609,200	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	13,855,000	12,575,000	90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	14,980,000	14,671,000	97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Jenis	14,980,000	1,440,000	59
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang dilayani	Bulan	12,144,000	12,110,100	99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang tersedia makan minum	Kegiatan	167,641,000	167,213,505	99
	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	LPD			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	143,137,650	140,867,058	98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	BULAN	143,137,650	140,867,058	98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	Persen	123,105,900	110,948,125	90

Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	78,077,300	66,895,914	85
	Jumlah unit kendaraan dinas yang dilengkapi surat izin	Unit			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Peralatan	33,000,000	32,191,611	97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	Bangunan	12,028,600	11,860,600	98
	Jumlah jenis peralatan kerja yang terpelihara	Unit Gedung			
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persen	115,564,169,580	103,531,761,460	89
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	Persen	25,396,003,900	23,303,167,313	91
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Gedung	275.000.000	165.724.065	60
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Puskesmas	6.190.950.000	4.873.778.879	78
	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Paket			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Puskesmas	9.500.970.900	9.285.862.191	97
	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Paket			
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yang disediakan	Jenis	4.106.787.963	3.837.096.928	93
	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	Puskesmas			
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai	Jenis BMHP	5.322.295.037	5.140.705.250	96
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten	Persen	90.073.292.880	80.134.681.347	88
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	209.140.100	198.582.300	94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	259.580.000	258.950.000	99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	45.000.000	30.061.000	66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	21.611.400	16.958.200	78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	30.000.000	22.292.400	74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta KB aktif	Jumlah	95.800.200	94.976.700	99
	Jumlah Posbindu yang terbentuk	Unit			
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kelompok Pra Konsepsi	Unit			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	Jumlah	55.000.000	53.170.000	96
	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	Unit			
	Jumlah Penduduk Lansia yang dilakukan pembinaan kemandirian	Jumlah			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penduduk dengan hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	49.998.300	49.543.300	99

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penduduk dengan diabetes melitus yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	50.000.700	47.826.800	95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan standar	Jumlah	50.000.000	42.795.000	85
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	50.000.000	45.169.700	90
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	50.000.000	45.306.400	90
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Kurus	Jumlah	708.504.600	666.682.400	94
	Jumlah keluarga yang menerapkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)	Jumlah			
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe)	Jumlah			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan	Unit	15.000.200	14.960.200	99
	Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	Unit			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan STBM	Desa	162.500.100	150.843.800	92
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon	Jumlah	29.909.400	26.594.400	88
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah unit pelayanan Kesehatan khusus (UTD dan PMI)	Jumlah	1.330.286.200	1.330.286.200	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	179.984.800	163.089.800	90
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) Kapitasi	Jumlah	64.981.586.500	58.368.548.789	89
	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS (PBI)	Jumlah			
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan kunjungan di RS Wonomulyo	Jumlah	4.888.414.200	4.873.000.834	99
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah jenis dokumen laporan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (PKP, RUK, RPK)	Jumlah	15.650.566.680	13.354.236.044	85
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Target Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah	100.000.000	99.470.380	99
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	Jumlah	827.769.000	0	0
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah	49.359.700	46.971.300	95
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani di bawah 24 jam	Jumlah	137.805.400	88.895.400	64
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase gawat darurat yang ditangani	Persen	45.475.400	45.470.000	99
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe C dan D yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Persen	94.872.800	93.912.800	98
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	Unit	94.872.800	93.912.800	98
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan)	Persen	406,876,000	321,908,500	79
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga produk makanan dan minuman yang memiliki izin	Persen	406,876,000	321,908,500	79

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Unit	406.876.000	321,908,500	79
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	177.504.800	163.155.800	91
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader kesehatan	Persen	100.004.800	97.504.800	97
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	Jumlah	100.004.800	97.504.800	97
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS	Persen	77,500,000	65,651,000	84
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	Jumlah	77,500,000	65,651,000	84
	Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah			
	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan PHBS	Jumlah			
Jumlah			174.320.312.267	161.722.705.469	92,77

B. Alokasi Anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp174.320.312.267,00** (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dari Total Belanja Daerah sebesar **Rp1.522.423.000.728,00** (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Alokasi per program kegiatan sebagai berikut :

Program Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58,171,761,887
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	115,564,169,580
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	406,876,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	177.504.800

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Laporan kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali dan juga sebagai alat penilai kualitas kinerja serta alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).

Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai 4 (empat) bidang dan 1 (satu) Sekretariat, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Kesehatan untuk tahun-tahun berikutnya.

4.2 Saran

Laporan ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan kinerja ini dimasa yang akan datang.



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. H. Andi Depu Nomor 2 Polewali, Kode Pos 91311
Telepon : (0428) 2410798 Faks : (0428) 2410998

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H.M. SUAIB NAWAWI, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

H.M. SUAIB NAWAWI, SKM, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630927 198311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Angka kematian Ibu	19.9	7.62
		Angka kematian Bayi	10	14.5
		Angka kesakitan penyakit menular TB	158	204
		Angka kesakitan penyakit menular HIV/AIDS	1.88	1
		Angka kesakitan penyakit menular kusta	1.39	1
		Angka kesakitan penyakit menular Pneumonia Balita	4.6	4
		Angka kesakitan penyakit menular Hepatitis B	6.47	2
		Angka kesakitan penyakit menular Diare	13	25
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Hipertensi	180	71
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Diabetes Melitus	12	15
		Angka kesakitan penyakit tidak menular orang dengan gangguan jiwa berat	1.4	0.2
		Prevalensi penduduk lanjut Usia Risiko Tinggi	431	293
		Prevalensi Stunting	23.8%	18.6%
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	95%	95%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	92%	95.56%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penujang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 58,441,320,907	DAU
2	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp 227,012,435,849	DAU, DAK, JKN
3	Sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	Rp 406,876,000	DAU, DAK
4	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp 177,504,800	DAU, DAK
JUMLAH		Rp 286,038,137,556	DAU, DAK, JKN

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,



H.M. SUAIB NAWAWI, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630927 198311 1 001



Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

